

# Implementation of E-Government Through the Village Financial System Application (SISKEUDES) in Pagerwojo Village, Buduran Sidoarjo

## [Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Pagerwojo, Buduran Sidoarjo]

Febby Dwi Agustin<sup>1)</sup>, Lailul Mursyidah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [febbyagustin62@gmail.com](mailto:febbyagustin62@gmail.com), [lailulmursyidah@umsida.ac.id](mailto:lailulmursyidah@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to describe and analyze the implementation of E-Government through the Village Financial System Application (SISKEUDES) in financial management in Pagerwojo Village, Buduran District, Sidoarjo Regency. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Data analysis uses the Miles and Huberman model. The results show that the implementation of SISKEUDES improves efficiency and accountability; however, several challenges remain in its implementation. Based on the analysis of six E-Government indicators according to Indrajit (2005), the content development indicator shows that the village already has a website. Still, it has not been optimally utilized due to limited content and incomplete information. The competency-building indicator indicates that training has been conducted, but the technical capacity of village officials remains uneven. The connectivity indicator shows that infrastructure is available, but unstable internet quality remains a major obstacle in system implementation. In the cyber laws indicator, the implementation of SISKEUDES complies with existing regulations and is supported by system security features, although officials' understanding of legal aspects is still limited. Furthermore, the citizen interface indicator remains weak, as public access to information is still limited and largely conventional. Lastly, the capital indicator shows that funding supports system operations, but its allocation has not been fully directed toward information technology development. Therefore, the implementation of SISKEUDES in Pagerwojo Village has been carried out as a form of E-Government implementation; however, improvements in human resources, infrastructure, and information transparency are still needed to achieve good governance.*

**Keywords -** E-Government, SISKEUDES, Village Financial Management

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan E-Government melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, namun masih terdapat kendala dalam penerapannya. Berdasarkan analisis enam indikator E-Government menurut Indrajit (2005), indikator content development menunjukkan bahwa desa telah memiliki website, namun masih belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan konten dan belum tersedianya informasi secara lengkap. Indikator competency building menunjukkan bahwa pelatihan telah dilakukan, tetapi kemampuan teknis aparatur masih belum merata. Indikator connectivity bahwa infrastruktur perangkat telah tersedia, namun kualitas jaringan internet yang tidak stabil menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan sistem. Pada indikator cyber laws, penerapan SISKEUDES telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan didukung oleh fitur keamanan sistem, meskipun pemahaman aparatur terhadap aspek hukum masih terbatas. Selanjutnya, indikator citizen interface, masih lemah karena akses informasi pada masyarakat masih belum optimal dan masih bersifat konvensional. Yang terakhir pada indikator capital, ketersediaan anggaran telah mendukung operasional sistem, namun pengalokasiannya belum sepenuhnya diarahkan pada pengembangan teknologi informasi. Jadi penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Pagerwojo telah berjalan sebagai bentuk penerapan E-Government, tetapi masih memerlukan peningkatan pada aspek SDM, infrastruktur dan keterbukaan informasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.*

**Kata Kunci –** E-Government, SISKEUDES, Pengelolaan Keuangan Desa

## I. PENDAHULUAN

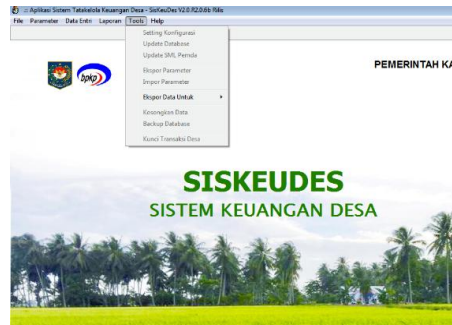
E-Government adalah suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lainnya yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet), dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. Di Indonesia, E-Government tidak diatur dalam suatu undang-undang yang khusus, tetapi memiliki dasar hukum yang kuat melalui beberapa persatuan perundang-undangan yang saling mendukung. Regulasi awal yang mendasar dalam pengembangan E-Government di Indonesia yaitu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government. Penguatan kebijakan E-Government dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres ini dijelaskan sebagai upaya pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh sistem elektronik di instansi pemerintahan agar tidak berjalan sendiri-sendiri. SPBE bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital. Tujuan dari pembentukan SPBE sendiri adalah untuk mengetahui pencapaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintahan daerah, memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada instansi dan pemerintahan [1].

Desa merupakan satuan pemerintah paling bawah yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pelayanan publik kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Desa dipimpin oleh kepala desa yang memiliki kekuasaan di dalam pengelolaan keuangan. Keuangan desa meliputi hak serta kewajiban yang berkaitan dengan uang dan harta desa. Desa dapat mengelola keuangannya sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta disiplin anggaran. Setiap desa juga berhak menyusun laporan keuangan untuk menunjukkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan aktivitas ekonomi yang dilaksanakan, sebagai panduan dalam penyusunan anggaran berikutnya. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik maupun nonfisik[2].

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam pelaporan keuangan. Dalam struktur pemerintahan desa, pihak yang paling berperan dalam pengoperasian aplikasi ini adalah bendahara desa yang bertugas sebagai operator utama sistem. Bendahara desa memiliki tanggung jawab untuk melakukan input data keuangan, mencatat seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran, serta memastikan bahwa setiap data yang dimasukkan sesuai dengan bukti administrasi yang ada. Selain itu, bendahara desa juga berperan dalam menyusun laporan keuangan secara berkala melalui aplikasi SISKEUDES sehingga laporan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan sistematis. Kaur Keuangan turut membantu dalam proses pengelolaan aplikasi, terutama dalam hal verifikasi data, pengarsipan dokumen, serta memastikan kelengkapan administrasi keuangan desa. Peran kaur keuangan menjadi penting dalam mendukung kelancaran operasional aplikasi, terutama ketika volume data yang dikelola cukup besar. Tidak hanya itu, sekretaris desa juga memiliki fungsi dalam melakukan koordinasi administrasi serta membantu pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan yang dilakukan melalui sistem. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, pengelolaan SISKEUDES di tingkat desa dapat berjalan lebih terorganisir, sistematis, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi tidak hanya bergantung pada pihak saja, tetapi juga melibatkan kerja sama antara perangkat desa. Dengan demikian, proses pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, serta meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan data.

Kepala desa memiliki peran yang sangat penting sebagai penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa yang menggunakan aplikasi SISKEUDES. Kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai pihak yang melakukan pengesahan terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh bendahara desa melalui sistem. Dalam hal ini, kepala desa memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain pengelolaan di tingkat desa, aplikasi SISKEUDES juga berada di bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat, khususnya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pengembangan dan standarisasi sistem. Peran kedua lembaga tersebut sangat penting dalam memastikan bahwa aplikasi yang digunakan oleh desa telah sesuai dengan ketentuan hukum serta mampu mendukung tata kelola keuangan yang baik. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga berperan dalam melakukan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada aparatur desa dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak tersebut, pengelolaan aplikasi SISKEUDES menjadi lebih terarah dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menunjukkan bahwa sistem ini merupakan bagian dari pengelolaan SISKEUDES yang tidak hanya ditentukan oleh

kemampuan aparat desa, tetapi juga oleh dukungan sistem dan kebijakan dari berbagai tingkatan pemerintah. Berikut lampiran gambar aplikasi SISKEUDES.



Gambar 1 Tampilan Awal Aplikasi Sistem Keuangan Desa (2024)

Sumber: <https://images.app.goo.gl/cDkDZFhg93DBqRLy9> (2024)

Melalui aplikasi SISKEUDES, pemerintah berharap desa lebih mandiri dan juga bekerja lebih keras untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat di desa. Aplikasi SISKEUDES baru dikeluarkan oleh BPKP pada tahun 2016 serta telah dimanfaatkan di beberapa desa. Pada tahun 2016 ditemukan sejumlah hambatan yang muncul seperti keterbatasan fitur, masalah keamanan data, teknologi yang kurang memadai, dan kurangnya pemahaman serta sosialisasi. Dengan adanya aplikasi SISKEUDES, pemerintahan desa harus memanfaatkan akuntabilitas untuk mengelola keuangan desa, serta mendorong aparat desa untuk bekerja lebih terencana dan disiplin. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Maka dari itu, peran sosialisasi, kapasitas SDM, serta pengawasan berkelanjutan menjadi penentu agar teknologi tidak berhenti, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Village Governance*) [3].

Penerapan E-Government di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pemerintahan sudah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai sistem utama dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa sejak tahun 2016. Penerapan SISKEUDES dilakukan untuk menggantikan sistem manual yang sebelumnya menggunakan *Microsoft Word* dan *Microsoft Excel*, yang dinilai kurang efektif karena proses administrasi berjalan lambat, rawan kesalahan pencatatan, serta memiliki potensi manipulasi data. Setelah adanya penerapan SISKEUDES, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih terstruktur dan sistematis karena seluruh tahapan penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan telah terintegrasi dalam satu aplikasi yang disesuaikan dengan regulasi pemerintah. Ini dibuktikan dengan laporan APBDes Desa Pagerwojo Tahun Anggaran 2024-2025 yang telah diinput secara lengkap ke dalam aplikasi SISKEUDES, mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, sehingga secara administratif penerapan sistem telah berjalan dengan baik [4].

Aplikasi SISKEUDES menjadi salah satu contoh inovasi digital penting yang digunakan untuk mengelola keuangan pemerintahan desa. Dengan memperkenalkan satu sistem yang terpadu, seluruh proses pengelolaan keuangan desa bisa diatur dengan lebih rapi dan teratur. Sistem ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menggabungkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan. Di tahap penatausahaan, semua transaksi direkam dengan cara yang sama, sehingga meminimalkan kekacauan dan kemungkinan adanya data yang berulang. Proses ini terus berjalan sampai tahap laporan akhir, di mana data tersebut kemudian disusun menjadi laporan yang sudah siap digunakan untuk melakukan evaluasi. Selain itu, menggunakan satu platform juga membuat proses pengawasan lebih mudah, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Semua faktor itu membuat SISKEUDES tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencatat, tetapi juga menjadi dasar pengelolaan keuangan desa yang lebih bertanggung jawab dan transparan.

SISKEUDES mempunyai berbagai menu utama yang saling terintegrasi, di antaranya menu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada menu perencanaan dan penganggaran, terdapat fitur untuk menginput kegiatan, rincian biaya, serta sumber pendanaan desa. Pada menu penatausahaan tersedia fitur pencatatan transaksi seperti buku kas umum, buku bank, dan buku pajak yang digunakan untuk mencatat setiap aktivitas keuangan secara detail. Kemudian pada menu pelaporan, aplikasi secara otomatis menyusun berbagai laporan keuangan seperti laporan realisasi APBDes, laporan kas, dan laporan lainnya yang dibutuhkan dalam proses administrasi pemerintahan desa. Sementara itu, pada menu pertanggungjawaban, seluruh data yang telah diinput akan dirangkum menjadi laporan akhir yang siap diajukan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pihak yang terkait. Selain menu utama, SISKEUDES juga dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung yang memudahkan pengguna, seperti fitur validasi data untuk meminimalisir kesalahan input, fitur penguncian data (posting) yang berfungsi untuk mengamankan data agar tidak dapat diubah setelah terverifikasi, serta fitur pencetakan laporan secara otomatis yang mempercepat proses administrasi. Aplikasi SISKEUDES juga dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah

dipahami sehingga dapat digunakan oleh aparatur desa dengan tingkat kemampuan teknologi yang beragam. Dengan adanya integritas antarmenus dan fitur, SISKEUDES mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib, terstruktur, efisien, serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut adalah rekapitulasi laporan data APBDes Siskeudes tahun 2024-2025.

Tabel 1: Rekapitulasi Laporan Data APBDes Tahun Anggaran 2024-2025 Pemerintahan Desa Pagerwojo

Laporan APBDes Tahun Anggaran 2024-2025 Pemerintahan Desa Pagerwojo						
Uraian	2024			2025		
	Anggaran	Realisasi	Lebih Kurang	Anggaran	Realisasi	Lebih Kurang
1. Pendapatan						
Pendapatan Asli Desa	137.800.000,00	131.000.000,00	5.800.000,00	141.000.000,00	-	-
Pendapatan Transfer	2.237.463.721,00	2.318.713507,00	8.745.214,00	3.002.036.823,00	-	-
Dana Desa	1.084.271.000,00	1.084.471.000,00	200.000,00	88.800.000,00	-	-
Bagi Hasil pajak Dan Retribusi	694.680.779,00	698.020.977,00	3.340.198,00	-	-	-
Alokasi Dana Desa	498.511.942,00	486.226.530,00	12.285.412,00	-	-	-
Bantuan keuangan Kab/kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-	-	-
Pendapatan Lain Lain	170.367.668,00	180.271.434,11	9.903.766,11	-	-	-
Jumlah pendapatan	2.635.631.631.389,00	2.629.989.941,11	9.903.766,11	3.231.836.823,00	-	-
2. Belanja Desa						
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.367.573.436,40	1.326.907.768,00	40.665.668,40		-	-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	473.402.945,00	453.416.000,00	19.986.945,00		-	-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	179.645.000,00	174.145.000,00	5.500.000,00		-	-
Bidang Pemberdayaan	442.370.000,00	433.370.000,00	9.000.000,00		-	-
Bidang Penyelenggaraan Bencana, Darurat Mendesak Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00		-	-
Belanja Pegawai	-	-	-	836.966.400,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	1.627.208.127,57	-	-
Belanja Modal	-	-	-	657.119.587,83	-	-
Belanja Tak Terduga	-	-	-	180.000.000,00	-	-
Jumlah Belanja	2.642.991.381,00	2.567.838.768,99	75.152.613,40	3.301.294.115,40	-	-
Sirplus Defisit	(7.359.992,40)	(62.151.173,11)	(69.511.165,51)	(69.457.292,40)	-	-
3. Pembiayaan Desa						
Penerimaan Pembiayaan	7.359.992,40	7.359.992,40	0,00	69.457.292,40	-	-
Pembiayaan Neto	7.359.992,40	7.359.992,40	0,00	69.457.292,40	-	-
SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	69.511.165,51	(69.511.165,51)	69.457.292,40	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan	-	-	-	0,00	-	-

Sumber: Pemerintahan Desa Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo (2024-2025)

Berdasarkan Tabel 1, laporan APBDes Desa Pagerwojo pada tahun anggaran 2024-2025 sudah diinput di dalam aplikasi SISKEUDES. Dengan ini, pemerintahan sudah menggunakan aplikasi tersebut secara efektif. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa input data yang telah di masukkan mencakup seluruh aspek mulai dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, hingga Pembiayaan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah mendorong penggunaan sistem digital di antaranya SISKEUDES untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2023, sekitar 80% desa di wilayah Sidoarjo telah menerapkan aplikasi SISKEUDES, termasuk di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran. Namun, berdasarkan wawancara saya dengan Kepala Desa, Bendahara Desa dan Kaur Keuangan, ditemukan permasalahan yang terlihat dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES secara baik, terutama bagi perangkat desa yang belum terbiasa dengan teknologi informasi. Selain itu, kendala infrastruktur berupa jaringan internet yang tidak stabil sering menghambat proses input dan pengelolaan data keuangan, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Di sisi lain, sistem pengelolaan keuangan desa telah berbasis digital, transparansi informasi keuangan kepada masyarakat masih belum cukup baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem masih belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan SDM dan keterbukaan informasi publik, sehingga tujuan E-Government untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel masih belum sepenuhnya tercapai.

Penelitian ini menggunakan teori E-Government menurut Richardus Eko Indrajit (2005), sebagai landasan dalam menganalisis penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Teori ini menekankan bahwa penerapan E-Government tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Indrajit mengemukakan ke enam komponen utama dalam penerapan E-Government yaitu, *Content Development* (Pengembangan Konten) yaitu indikator yang mengukur kemampuan pemerintah dalam menyediakan dan mengelola konten digital yang relevan, akurat dan mudah dipahami, *Competency Building* (Pengembangan Kompetensi) yaitu indikator yang menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, *Citizen Interface* (Antarmuka dengan Masyarakat) yaitu indikator yang menilai sejauh mana sistem e-government menyediakan sarana interaksi yang mudah diakses, ramah penggunaan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, *Connectivity* (Konektivitas) yaitu indikator yang berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet, perangkat keras dan sistem pendukung lainnya, *Cyber Laws* (Hukum Siber) yaitu indikator yang menunjukkan keberadaan dan penerapan regulasi hukum yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan *Capital* (Permodalan/Anggaran) yaitu indikator yang menilai ketersediaan sumber daya keuangan dalam mendukung pengembangan dan keberlanjutan e-government. Keenam komponen tersebut digunakan sebagai acuan dalam menilai sejauh mana penerapan SISKEUDES mampu mendukung pengelolaan keuangan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam konteks digitalisasi administrasi pemerintah desa.

Dari penjelasan di atas, ada beberapa penemuan penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan aplikasi sistem keuangan desa, yang dilakukan oleh (Suriyanto Ilham & Evi Lusiani,2022) yang berjudul “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan SISKEUDES di Desa Kukutio telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola keuangan desa, terutama dalam membantu aparatur desa melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara lebih terstruktur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala teknis dan administratif yang masih dihadapi, antara lain sistem aplikasi yang tidak memungkinkan perubahan data setelah proses posting, sehingga menuntut ketelitian tinggi dari penggunaan, selain itu keterlambatan pencairan dana turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun SISKEUDES secara sistem telah mendukung prinsip akuntabilitas, namun masih diperlukan perbaikan dari sisi lain fleksibilitas sistem dan kesiapan penggunaan anggaran penerapannya dapat berjalan lebih baik [5].

Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (A. Faizah & R. Sari,2022) yang berjudul “Analisis Penerapan sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Banyudono Kecamatan Dukun”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES di Desa Banyudono cukup efektif dan mampu membantu aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan secara lebih sistematis, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aplikasi SISKEUDES dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan teknis, terutama terkait dengan ketelitian dalam proses penginputan data dan keberhasilan kemampuan sebagai aparatur desa dalam memahami fitur aplikasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan pengawasan agar pemanfaatan SISKEUDES dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan [2].

Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (B. R. Maylita & L. Mursyidah, 2025) berjudul “Penerapan SISKEUDES di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tambak Kalisogo telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara baik. SISKEUDES dinilai mampu mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel, khususnya dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan sejumlah hambatan dalam teknologi informasi serta infrastruktur pendukung yang belum memadai, seperti jaringan internet yang tidak stabil. Di sisi lain, aspek komunikasi antara aparat desa dan dukungan struktur birokrasi dinilai sudah berjalan cukup baik dan mendukung pelaksanaan SISKEUDES. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan daerah dan partisipasi masyarakat agar pemanfaatan aplikasi SISKEUDES dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel [6].

Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada fokus penerapan E-Government melalui aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo, yang tidak menitikberatkan pada aspek teknis pengelolaan keuangan desa, tetapi juga pada upaya mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menganalisis penerapan SISKEUDES berdasarkan teori E-Government, khususnya pada aspek kompetensi sumber daya manusia, konektivitas sistem, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta membandingkan kondisi pengelolaan keuangan desa sebelum dan sesudah penerapan sistem digital. Selain itu penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan literatur administrasi publik mengenai tata kelola keuangan desa berbasis digital sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan penelitian di atas, saya mengambil penelitian ini dengan judul Penerapan E-Government melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo, yang di dalamnya membahas penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam memberikan kemudahan pelaporan keuangan, tidak hanya itu, dalam menata kelola keuangan desa dengan maksimal, juga menjadi tolak ukur pengelolaan keuangan desa yang selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran praktis tentang penerapan SISKEUDES dalam tata kelola desa dan bisa menjadi rujukan atau tolok ukur bagi desa lain yang ingin memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam keadaan sosial yang terjadi secara alamiah. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai bentuk implementasi e-government di tingkat pemerintahan desa [7]. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses penggunaan SISKEUDES, manfaat yang dirasakan, serta kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Pagerwojo dalam pengelolaan keuangan desa. Fokus penelitian ini yaitu penerapan aplikasi SISKEUDES dalam mendukung pelaksanaan E-Government di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo [8]. Landasan teoritis penelitian ini mengacu pada konsep E-Government menurut Eko Indrajit (2005), yang mengatakan bahwa E-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Penerapan SISKEUDES dipandang sebagai salah satu bentuk digitalisasi administrasi keuangan desa yang sejalan dengan konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara langsung penggunaan aplikasi SISKEUDES. Lokasi penelitian ini dipilih karena telah menerapkan aplikasi SISKEUDES sebagai sistem utama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa yang bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap aturan keuangan desa serta pelaporan akhir, Bendahara Desa yang bertugas sebagai pelaksana teknis utama dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES, dan Kaur Keuangan yang bertugas membantu Bendahara Desa dalam input data, verifikasi, dokumentasi dan pencetakan laporan. Yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, serta melalui observasi langsung terhadap proses penggunaan aplikasi SISKEUDES. Sementara data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti laporan keuangan desa, serta dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penerapan SISKEUDES. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan di kantor desa untuk menggali informasi secara mendalam terkait penerapan SISKEUDES. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana proses pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pencatatan dokumen resmi dan rekaman yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis *Miles* dan *Huberman* yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian, penyederhanaan, serta pengabstrakan data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Data yang berkaitan dengan tujuan

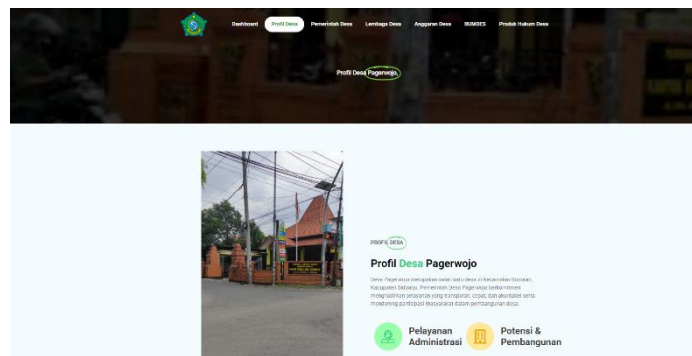
penelitian akan disisihkan, sedangkan data yang penting akan dirangkum dan disederhanakan agar lebih mudah difahami. Reduksi data yaitu tahap penyusunan informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, serta uraian yang menjelaskan hasil penelitian secara terstruktur. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi di lapangan. Sedangkan penarikan kesimpulan yaitu tahap akhir dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menemukan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan diperoleh dengan cara menginterpretasikan data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan, yaitu teori e-government. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara pada tahap awal, namun akan semakin kuat setelah dilakukan verifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung [9].

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Desa Pagerwojo, diperoleh data bahwa penerapan E-Government melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa telah berjalan sebagai dari upaya digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Penerapan sistem ini didukung oleh penggunaan aplikasi berbasis teknologi yang mampu mengintegrasikan seluruh proses keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya mengikuti perkembangan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Kaur Keuangan juga menunjukkan bahwa penggunaan SISKEUDES memberikan dampak positif, terutama dalam menciptakan ketertiban administrasi serta mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penggunaan aplikasi masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa. Sebelum penggunaan SISKEUDES, proses pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel dan Word yang dinilai kurang efektif serta berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Meskipun saat ini sistem telah berbasis digital, tantangan masih muncul dari aspek sumber daya manusia yang belum merata, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang tidak stabil, serta belum optimalnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan SISKEUDES telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, namun masih diperlukan upaya perbaikan dan penguatan pada berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, perbaikan kualitas infrastruktur teknologi, serta optimalisasi pemanfaatan sistem untuk mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori E-Government menurut Indrajit (2005), keberhasilan penerapan sistem tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan enam indikator utama, yaitu Content Development, Competency Building, Connectivity, Cyber Laws, Citizen Interface, dan Capital, untuk menganalisis sejauh mana penerapan SISKEUDES di Desa Pagerwojo telah berjalan secara optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

#### Pengembangan Konten (*Content Development*)

Berdasarkan hasil wawancara terbaru dengan Bendahara Desa Pagerwojo, diperoleh informasi bahwa desa telah memiliki website resmi yang aktif digunakan pada tahun 2026 sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Kehadiran website ini menjadi langkah awal dalam pengembangan konten digital desa yang sebelumnya masih dilakukan secara manual melalui pertemuan warga, RT/RW, maupun penyampaian langsung di balai desa. Dengan adanya website, masyarakat mulai dapat mengakses informasi terkait layanan desa, pembangunan desa, pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan kebersihan serta informasi umum lainnya secara lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Berdasarkan hasil wawancara yang diajukan ke Bendahara Desa: *“Bagaimana pemanfaatan website desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat?”* Bendahara Desa menjawab bahwa *“pemanfaatan website ini masih belum optimal karena masih dalam tahap pengembangan awal. Fitur yang tersedia belum lengkap dan belum diperbarui secara berkala. Beberapa informasi penting, seperti laporan keuangan desa, realisasi anggaran, dan data transparansi publik, masih belum ditampilkan secara rinci di website. Selain itu, tingkat pemanfaatan oleh masyarakat juga masih rendah karena belum adanya sosialisasi yang maksimal terkait keberadaan website tersebut, sehingga sebagian besar masyarakat masih menggunakan cara manual untuk memperoleh informasi”*. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan dalam penyediaan media digital, penerapannya masih memerlukan penguatan dari sisi pengelolaan fitur dan pemanfaatannya oleh masyarakat. (hasil wawancara 09 Maret 2026)



Gambar 2 Website Resmi Desa Pagerwojo

Sumber: <https://www.pagerwojo-sda.my.id/profil-des/>

Berdasarkan Gambar 2, jika dianalisis menggunakan teori E-Government menurut Indrajit (2005), Content Development merupakan indikator yang menekankan pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan informasi digital yang berkualitas, akurat, relevan, dan mudah diakses oleh banyak masyarakat secara luas. Desa Pagerwojo, dengan adanya website desa yang mulai aktif pada tahun 2026, dapat dikategorikan sebagai bentuk perkembangan yang positif dalam implementasi e-government, khususnya dalam aspek penyediaan informasi publik secara digital. Namun, jika dilihat lebih mendalam, pengembangan fitur yang dilakukan masih belum memenuhi kriteria optimal sebagaimana yang dijelaskan dalam kategori tersebut, karena fitur yang disajikan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Website desa seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai media informasi umum, tetapi juga sebagai sarana transparansi publik yang menyajikan data keuangan, laporan kegiatan, serta informasi strategis lainnya yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Selain itu, kualitas fitur juga perlu diperhatikan baik dari segi kelengkapan informasi, kemudahan akses, maupun frekuensi pembaruan data. Meskipun secara struktural Desa Pagerwojo telah memiliki platform digital, secara substansi pengembangan fitur masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung tujuan e-government secara maksimal.

Jika dilihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suriyanto Ilham & Evi Lusiani, 2022) [5], yang menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDEDES lebih menekankan pada aspek pengelolaan keuangan secara internal, sedangkan transparansi kepada masyarakat masih menjadi hambatan, terutama jika tidak didukung oleh media digital yang memadai. Selain itu, penelitian (A. Faizah & R. Sari, 2022) [2] menjelaskan bahwa keberhasilan sistem keuangan desa yang berbasis digital tidak hanya bergantung pada pengguna aplikasi, tetapi juga tergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Dengan adanya website Desa Pagerwojo pada tahun 2026, bisa dianggap sebagai langkah yang baik dalam mengatasi tantangan tersebut, meskipun masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar bisa mendukung transparansi dan akuntabilitas dengan baik.

#### **Pembangunan Kompetensi SDM (Competency Building)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Kaur Keuangan di Desa Pagerwojo, telah diketahui bahwa aspek pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDEDES). Bendahara desa menyampaikan bahwa sejak awal penerapan SISKEUDEDES pada tahun 2018, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas aparatur, seperti mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Pelatihan tersebut ditujukan agar aparatur desa, khususnya bendahara desa sebagai operator utama, mampu memahami alur sistem, mulai dari proses penginputan data, pengelolaan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan secara sistematis. Hasil wawancara yang diajukan ke bendahara desa: *“Apakah aparatur desa telah mendapatkan pelatihan terkait penggunaan aplikasi SISKEUDEDES?”* Bendahara Desa menjawab bahwa *“Pelatihan ini memberikan dampak yang positif, terutama dalam meningkatkan pemahaman dasar aparatur desa terhadap penggunaan teknologi informasi. Namun, hingga saat ini masih ditemukan kendala di lapangan, yaitu adanya keterbatasan kemampuan teknis pada sebagian perangkat desa yang masih belum terbiasa menggunakan sistem berbasis digital. Kondisi ini menyebabkan proses pengelolaan keuangan terkadang membutuhkan waktu lebih lama, terutama pada tahap penginputan dan verifikasi data. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem digital juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur desa yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman teknologi yang berbeda-beda”*. Dengan ini, meskipun upaya peningkatan kompetensi telah dilakukan, pembangunan SDM di Desa Pagerwojo masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan. (hasil wawancara 09 Maret 2026)

Tabel 2 Data Kompetensi SDM Aparatur Desa dalam Pengoperasian SISKEUDES Desa Pagerwojo

No	Pembangunan Kompetensi SDM	Jumlah Apratur	Persentase
1	Aparatur yang telah mengikuti pelatihan	4 Orang	50%
2	Aparatur yang mampu mengoperasikan aplikasi SISKEUDES secara mandiri	2 Orang	25%
3	Aparatur yang masih bergantung pada operatur utama	3 Orang	37%
4	Aparatur yang mengalami kesulitan teknis	2Orang	25%
5	Aparatur yang memahami seluruh fitur aplikasi	2 Orang	25%

Sumber: Pemerintahan Desa Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo (2026)

Berdasarkan Tabel 2, terdapat perbedaan antara pelaksanaan pelatihan dengan tingkat penguasaan teknis yang dimiliki oleh aparatur desa. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap fitur aplikasi juga menjadi indikator bahwa proses pembelajaran belum berjalan dengan baik. Kondisi ini dapat berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan desa, karena kesalahan dalam penginputan data atau keterlambatan pelaporan dapat terjadi apabila sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem belum memiliki kompetensi yang memadai. Masih diperlukan strategi peningkatan sumber daya manusia yang lebih terstruktur, seperti pelatihan keberlanjutan, pendampingan teknis, serta evaluasi berkala terhadap kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Menurut Indrajit (2005), pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi. Meskipun pelatihan telah dilakukan tetapi masih belum di ikuti dengan peningkatan kopetensi secara menyeluruh. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sehingga (A. Faizah & R. Sari,2022) [2] yang menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi SISKEUDES terletak pada rendahnya pemahaman aparatur terhadap fitur aplikasi serta kurangnya ketelitian dalam proses penginputan data. Sementara itu, penelitian (B. R. Maylita & L. Mursyidah,2025) [7] menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan sistem keuangan desa berbasis digital. Dengan ini, hasil penelitian di Desa Pagerwojo memperkuat temuan penelitian sebelumnya bahwa keberhasilan penerapan e-government tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelola. Pengembangan kompetensi SDM harus menjadi prioritas utama dalam mendukung keberlanjutan dan kebaikan dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES di tingkat desa.

#### **Konektivitas Infrastruktur (Connectivity)**

Berdasarkan hasil wawancara yang diajukan ke Bendahara Desa: “Bagaimana kondisi infrastruktur teknologi (komputer, laptop) dalam mendukung penggunaan SISKEUDES?” Bendahara Desa menjawab, “Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi secara umum sudah cukup untuk mendukung beberapa kendala yang cukup signifikan, terutama pada aspek jaringan internet. Bendahara desa menyampaikan bahwa perangkat keras seperti komputer dan laptop sudah tersedia dan dapat digunakan untuk mengoperasikan aplikasi, namun kualitas jaringan internet yang tidak stabil sering kali menjadi hambatan utama dalam proses penginputan data maupun pengiriman laporan keuangan. Dalam beberapa kondisi, proses akses aplikasi menjadi lambat bahkan mengalami gangguan, sehingga menghambat pekerjaan aparatur desa dan memperpanjang waktu penyelesaian laporan. Selain itu, keterbatasan kecepatan internet juga menyebabkan proses sinkronisasi data tidak berjalan secara optimal, terutama ketika volume data yang diinput cukup besar. Aparatur desa juga menyebutkan bahwa gangguan jaringan sering terjadi pada jam-jam tertentu, sehingga mereka harus menyesuaikan waktu kerja agar dapat mengakses sistem dengan lebih lancar”. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur dasar telah tersedia, kualitas konektivitas jaringan masih menjadi faktor penghambat dalam implementasi SISKEUDES secara maksimal. Aspek konektivitas tidak hanya dilihat dari ketersediaan perangkat, tetapi juga dari kualitas jaringan yang mampu mendukung operasional sistem secara berkelanjutan dan stabil. (hasil wawancara 09 Maret 2026)

Tabel 3 Data Konektivitas Infrastruktur dalam penggunaan SISKEUDES

No.	Indikator Konektivitas	Kondisi	Jumlah/Skor	Persentase
1	Ketersediaan komputer/laptop	Tersedia	4 unit	100%
2	Perangkat dapat digunakan untuk SISKEUDES	Optimal	4 unit	100%
3	Koneksi internet tersedia Efektivitas penggunaan sistem	Ada	1 jaringan	100%
4	Efektivitas penggunaan sistem	Cukup	-	65%
5	Kesiapan infrastruktur secara keseluruhan	Cukup memadai	-	70%

Sumber: Pemerintahan Desa Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo (2026)

Berdasarkan Tabel 3, konektivitas infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam penerapan SISKEUDES, karena sistem berbasis digital sangat bergantung pada kualitas jaringan internet yang stabil dan cepat. Apabila permasalahan ini tidak segera diatasi, maka efektivitas dan efisiensi yang diharapkan dari penerapan e-government tidak dapat tercapai dengan baik. Maka perlu dilakukannya upaya peningkatan kualitas jaringan internet, baik melalui penyedia layanan yang lebih baik maupun dukungan dari pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur digital yang lebih memadai. Menurut Indrajit (2005), connectivity berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi. Dalam penelitian ini kendala utama terletak pada kualitas jaringan yang tidak stabil. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Surianto Ilham & Evi Lusiani, 2022) [5] yang menyatakan bahwa kendala teknis, termasuk infrastruktur dan sistem, menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi SISKEUDES. Selain itu, penelitian (B. R. Maylita & L. Mursyidah, 2025) [7] juga menemukan bahwa jaringan internet yang tidak stabil menjadi permasalahan utama dalam penerapan aplikasi SISKEUDES di tingkat desa, sehingga menghambat proses administrasi dan pelaporan keuangan. Jadi, hasil penelitian di Desa Pagerwojo memperkuat temuan sebelumnya bahwa keberhasilan implementasi e-government tidak hanya bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur teknologi yang tersedia. Oleh karena itu, peningkatan konektivitas jaringan internet menjadi salah satu faktor kunci yang harus diperhatikan untuk mendukung keberlanjutan dan kebaikan pengguna aplikasi SISKEUDES dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa.

#### Regulasi / Hukum Siber (*Cyber Laws*)

Berdasarkan hasil wawancara yang diajukan ke Bendahara Desa: “Apakah penggunaan SISKEUDES sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Sejauh mana aparat desa memahami dasar hukum penggunaan SISKEUDES?” Bendahara Desa menjawab, “Penerapan aplikasi SISKEUDES telah mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta regulasi sebelumnya seperti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Aparatur desa menyampaikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, wajib dilakukan melalui aplikasi SISKEUDES sebagai bentuk kepatuhan terhadap mekanisme penguncian data (*posting*) yang tidak dapat diubah setelah diverifikasi, sehingga memastikan keamanan dan keabsahan data keuangan desa. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemahaman aparat desa terhadap aspek hukum siber masih terbatas, karena mereka cenderung hanya mengikuti prosedur penggunaan aplikasi tanpa memahami secara mendalam dasar hukum dan penerapan regulasi tersebut”. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan regulasi sudah berjalan secara administratif, tetapi masih belum sepenuhnya dipahami secara konseptual oleh seluruh aparat desa. Meskipun sistem telah memiliki dasar hukum yang kuat, masih diperlukan peningkatan pemahaman aparat terkait regulasi agar pelaksanaan e-government dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. (hasil wawancara 09 Maret 2026)

Tabel 4 Data Penerapan Regulasi dalam Penggunaan SISKEUDES

No	Indikator regulasi/Hukum siber	Kondisi	Persentase
1.	Penggunaan SISKEUDES sesuai Permendagri	Ya	100%
2.	Aparatur memahami dasar hukum SISKEUDES	Sebagian	50%
3.	Sistem memiliki fitur penguncian data posting	Ada	100%
4.	Aparatur hanya mengikuti prosedur teknis	Ya	62,5%
5.	Kesalahan input dapat diperbaiki setelah posting	Tidak	0%
6.	Kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan	Tinggi	80%
7.	Sosialisasi regulasi kepada aparat desa	Terbatas	40%
8.	Pengawasan dari pemerintahan desa	Ada	75%
9.	Risiko pelanggaran administrasi	Rendah	20%
10.	Transparansi laporan berbasis regulasi	Cukup	60%

Sumber: Pemerintahan Desa Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo (2026)

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa penerapan regulasi dalam penggunaan SISKEUDES sudah berjalan dengan baik secara administratif, penggunaan aplikasi yang sesuai dengan ketentuan Permendagri, serta adanya fitur sistem yang mendukung keamanan data seperti penguncian posting. Tingkat pemahaman aparat terhadap regulasi masih tergolong rendah, yang benar-benar memahami dasar hukum penggunaan sistem, lainnya hanya menjalankan prosedur teknis tanpa memahami aspek regulasi secara mendalam. Selain itu, keterbatasan sosialisasi juga menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya pemahaman aparat desa terhadap hukum siber. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara implementasi teknis dan pemahaman normatif terhadap regulasi, yang berpotensi menimbulkan kesalahan administratif apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pemahaman hukum. Jadi, diperlukan upaya penguatan sosialisasi regulasi serta pelatihan yang tidak hanya berfokus pada teknis penggunaan aplikasi SISKEUDES, tetapi juga pada aspek hukum dan kebijakan yang terlibat. Menurut

Indrajit (2005) Regulasi atau Hukum siber merupakan aspek terpenting dalam menjamin legalitas dan keamanan sistem. Dalam regulasi sudah tersedia, namun masih belum sepenuhnya dipahami oleh aparat desa. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini sejalan dengan penelitian (Malahika, Karamoy & Pusung, 2018) [3] yang menyatakan bahwa penerapan SISKEUDES telah memiliki dasar hukum yang jelas dan menjadi instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian (Asih & Adiputra, 2022) [4] menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, terutama dalam kondisi yang menuntut ketertiban administrasi yang tinggi. Hasil penelitian di Desa Pagerwojo memperkuat temuan sebelumnya bahwa aspek *Cyber Laws* telah terpenuhi secara struktural, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pemahaman dan implementasi oleh aparat desa. Peningkatan literasi hukum dan pemahaman regulasi menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan penerapan e-government secara menyeluruh

#### **Antarmuka dengan Masyarakat (*Citizen Interfaces*)**

Berdasarkan hasil wawancara yang diajukan ke Bendahara Desa: *“Bagaimana cara pemerintah desa menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat?”* Bendahara Desa menjawab *“Aparatur desa masih menyampaikan bahwa hingga saat ini Desa Pagerwojo sudah memiliki platform digital resmi seperti website desa atau aplikasi pelayanan publik yang digunakan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan secara langsung, tetapi fitur untuk melihat informasi keuangan di website masih belum bisa diakses oleh masyarakat. Jadi, terkait kegiatan desa maupun laporan keuangan saat ini masih disampaikan secara manual melalui media seperti banner, grup WhatsApp tingkat Rt/Rw atau blackboard digital”*. Bendahara desa juga mengakui bahwa interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam konteks e-government masih bersifat konvensional dan belum memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Meskipun aplikasi SISKEUDES telah digunakan sebagai sistem internal pengelolaan keuangan, aspek internal berupa penyampaian informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar prinsip transparansi dan partisipasi publik dapat tercapai dengan baik. Bentuk kerja sama nyata antara pemerintah dan masyarakat, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan pemerintah dengan mudah melalui platform digital (Indrajit, 2005). (Hasil wawancara 09 Maret 2026)



Gambar 3 Wawancara dengan Bendahara Desa dan Sekretaris Desa

Sumber: Dokumentasi Wawancara di Pemerintahan Desa Pagerwojo (2025)

Berdasarkan Gambar 3, jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (B. R. Maylita & L. Mursyidah, 2025) [6] yang menyatakan bahwa aspek antarmuka dengan masyarakat masih menjadi salah satu kelemahan utama dalam penerapan SISKEUDES, karena Desa Pagerwojo sudah memiliki platform digital tetapi fiturnya masih belum digunakan seluruhnya. Selain itu, penelitian (Suriyanto Ilham & Evi Lusiani, 2022) [5] juga menunjukkan bahwa meskipun sistem SISKEUDES mampu meningkatkan pengelolaan keuangan secara internal, transparansi kepada masyarakat masih terbatas apabila tidak didukung oleh media digital yang memadai. Hasil penelitian di Desa Pagerwojo memperkuat temuan sebelumnya bahwa aspek Citizen Interface masih perlu ditingkatkan agar tujuan e-government dalam mewujudkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik dapat tercapai secara menyeluruh. Jadi, pengembangan media digital desa menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mendukung keterbukaan informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

#### **Pendanaan / Anggaran (*Capital*)**

Berdasarkan hasil wawancara yang diajukan ke Bendahara Desa: *“Apa saja sumber pendanaan dalam pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES?”* Bendahara Desa menjawab *“Penerapan aplikasi SISKEUDES sudah berjalan dengan baik dan menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan sistem pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa menyampaikan bahwa sumber utama pendanaan berasal dari dana desa, alokasi dana*

desa, serta pendapatan transfer lainnya yang dikelola melalui aplikasi SISKEUDES secara terintegrasi. Penggunaan anggaran tidak hanya difokuskan pada kegiatan pembangunan fisik, tetapi juga untuk mendukung operasional pemerintahan desa, termasuk pembiayaan perangkat desa, pengadaan sarana dan prasarana, serta kebutuhan administrasi berbasis digital. Selain itu, bendahara desa juga menjelaskan bahwa seluruh proses penganggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas". Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran serta ketergantungan pada kebijakan dari pemerintahan pusat dan daerah. Aparatur desa juga menambahkan bahwa meskipun dana desa cukup besar, alokasi harus disesuaikan dengan prioritas yang telah ditetapkan, sehingga tidak semua kebutuhan, termasuk pengembangan teknologi informasi, dapat terpenuhi dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek modal telah tersedia dan mendukung penerapan aplikasi SISKEUDES, namun pengelolaannya masih perlu dioptimalkan agar dapat mendukung pengembangan e-government secara maksimal. (Hasil wawancara 10 April 2025)

PENDAPATAN	
REVENUE	EXPENDITURE
PENDAPATAN ASLI DESA	1.000.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.000.000,00
PENDAPATAN LAIN-LAIN	1.000.000,00
Jumlah Pendapatan	3.000.000,00
BELANJA	
BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00
BELANJA MODAL	1.000.000,00
BELANJA TAN TERPADU	1.000.000,00
Jumlah Belanja	4.000.000,00
PEMBIAYAAN	
PEMBIAYAAN DESA	1.000.000,00
SILPA TAHUN SEBELUMNYA	1.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	1.000.000,00

Gambar 4 Laporan Anggaran Desa Pagerwojo Tahun Anggaran 2024-2025

Sumber: Dokumentasi diambil dari Kantor Pemerintahan Desa Pagerwojo

Berdasarkan Gambar 4, terlihat bahwa Pemerintah Desa Pagerwojo telah menyajikan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2024 dan 2025 dalam bentuk banner sebagai media transparansi publik. Dari sisi pendapatan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2012 sebesar Rp2.629.989,11 menjadi Rp3.231.836.823,00 pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fisik desa dalam pendapatan asli desa, pendapatan transfer, serta pendapatan lain-lain, yang mencerminkan keberagaman sumber pendanaan desa. Sementara itu, pada sisi belanja terlihat bahwa anggaran terbesar dialokasikan pada belanja barang dan jasa serta belanja pegawai, yang menunjukkan prioritas pemerintahan desa dalam mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Selain itu, adanya komponen belanja modal juga menunjukkan adanya upaya pembangunan infrastruktur desa sebagai bagian dari program pembangunan jangka menengah. Pada bagian pembiayaan ditunjukkan adanya penerimaan pembiayaan serta SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutupi kebutuhan anggaran yang berjalan. Penyajian data ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan struktur APBDes yang berlaku, meskipun informasi telah disajikan secara terbuka melalui banner, transparansi tersebut masih bersifat statis dan belum memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat secara digital. Penggunaan media visual ini sudah mencerminkan adanya upaya keterbukaan informasi, namun masih perlu ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi agar lebih efektif dan interaktif. Pendanaan ini merupakan faktor penting dalam mendukung keberlanjutan sistem. Aspek ini sudah terpenuhi, namun masih perlu dioptimalisasikan lagi supaya laporan anggaran bisa segera diunggah di website desa. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini sejalan dengan penelitian (A. Faizah & R. Sari, 2022) [2] yang menegaskan bahwa sistem keuangan desa yang terintegrasi mampu membantu aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan secara tertib dan sesuai dengan regulasi, sehingga meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Selain itu, penelitian (Suriyanto Ilham & Evi Lusiani, 2022) [5] juga menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SISKEUDES sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan pengelolaan anggaran yang memadai, meskipun masih terdapat kendala dalam fleksibilitas penggunaan dana.

## VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Pagerwojo dengan menggunakan enam indikator E-Government menurut Indrajit (2005), dapat disimpulkan bahwa

penerapan sistem berjalan sebagai bagian dari upaya digitalisasi tata kelola keuangan desa, namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada indikator *Content Development*, pemerintah desa telah menunjukkan perkembangan dengan tersedianya website sebagai media informasi publik, tetapi masih tergolong pengelolaan konten yang masih terbatas karena belum adanya pembaruan informasi secara berkala serta masih belum tersedianya data keuangan desa yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Pada indikator *Competency Building*, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendampingan, namun hasilnya belum merata karena masih terdapat aparatur yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Selain itu, pada indikator *Connectivity*, meskipun perangkat keras seperti komputer dan laptop telah tersedia, kualitas jaringan internet yang tidak stabil masih menjadi kendala utama dalam proses penginputan dan pelaporan data, sehingga memengaruhi penggunaan sistem. Sementara pada indikator *Cyber Laws*, penerapan SISKEUDES telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan didukung oleh fitur keamanan sistem, seperti penguncian data (posting), namun pemahaman aparatur desa terhadap aspek hukum masih terbatas dan lebih fokus pada pelaksanaan teknis. Di sisi lain, indikator *Citizen Interface* antara pemerintah desa dan masyarakat masih belum berjalan dengan baik karena keterbatasan pemanfaatan media digital dalam penyampaian informasi. Meskipun telah tersedia website desa, informasi keuangan masih belum dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, sehingga transparansi masih dilakukan melalui media konvensional seperti banner dan komunikasi langsung. Menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan informasi publik sepenuhnya belum tercapai. Sedangkan indikator *Capital* aspek pendanaan yang telah tersedia dan mampu mendukung operasional sistem, dengan sumber daya yang berasal dari dana desa dan pendapatan lainnya yang dikelola melalui aplikasi SIKEUDES secara terintegrasi. Pengalokasian anggaran masih terbatas dan belum sepenuhnya berfokus pada pengembangan teknologi informasi, sehingga belum mampu mendorong penerapan e-government secara menyeluruh. Dengan demikian, yang dapat saya simpulkan adalah bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Pagerwojo telah memenuhi aspek dasar dalam penerapan E-Government, tetapi masih memerlukan peningkatan yang signifikan, khususnya pada aspek kompetensi sumber daya manusia, kualitas infrastruktur jaringan, serta pengembangan sistem informasi publik agar dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital secara baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintah Desa Pagerwojo atas pemberian izin serta dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh aparatur desa, khususnya Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Kaur Keuangan, yang telah berkenan menjadi informan serta memberikan data, informasi, dan waktu selama proses berlangsung.

## REFERENSI

- [1] D. Dwiyanto, "Dasar Hukum Bagi E-Government Di Indonesia: Studi Pemetaan Hukum Pada Pemerintah Daerah," *J. Penelit. Huk.*, vol. 2, no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022, [Online]. Available: <https://lib.unnes.ac.id/20002/>
- [2] A. Faizah and R. Sari, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun," *Jesya (Jurnal Ekon. Ekon. Syariah)*, vol. 5, no. 1, pp. 763–776, Jan. 2022, doi: 10.36778/jesya.v5i1.539.
- [3] J. M. Malahika, H. Karamoy, and R. J. Pusung, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)," *Going Concern J. Ris. Akunt.*, vol. 14, no. 1, pp. 578–583, 2018, doi: 10.32400/gc.13.04.21514.2018.
- [4] K. G. Asih and I. M. P. Adiputra, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19," *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi)*, vol. 13, no. 1, pp. 12–23, 2022.
- [5] S. I. K. E. LUSIANI, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. (Suriyanto Ilham; Kadek Evi Lusiani)," 2022.
- [6] B. R. Maylita and L. Mursyidah, "Implementation of Siskeudes in Tambak Kalisogo Village , Jabon District , Sidoarjo Regency," *Int. Conf. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 2, no. 2, pp. 2800–2809, 2025.
- [7] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, no. January. 2017.
- [8] Dwi Nurrahmawati, Yianne Gabrila Sriyanto, and Nuwun Priyono, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Rejosari Kecamatan Pakis," *Pop. J. Penelit. Mhs.*, vol. 2, no. 2, pp. 101–115, 2023, doi: 10.58192/populer.v2i2.856.
- [9] W. D. Fristanti and I. U. Choiriyah, "Efektivitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengembangan Government to Government (G2G) Di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo," *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 14, no. 1, pp. 12–29, 2025, doi: 10.33366/jisip.v14i1.3218.

- [10] M. Rahmayu and Y. Siantono, “Penerimaan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskuedes) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model Di Kecamatan Bakauheni,” *JUTIM (Jurnal Tek. Inform. Musirawas)*, vol. 8, no. 2, pp. 131–141, 2024, doi: 10.32767/jutim.v8i2.2067.
- [11] A. E. Liata, “Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar,” *Ilmu Sos. dan ilmu Pemerintah.*, p. 101, 2021.
- [12] Muna Nurmalinda and Muhammad Riyandi Firdaus, “Open Government Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Kantor Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong,” *Japb*, vol. 7, no. 2, pp. 1800–1815, 2024, doi: 10.35722/japb.v7i2.1118.
- [13] F. F. Satrio, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak,” *JPASDEV J. Public Adm. Sociol. Dev.*, vol. 1, no. 2, p. 111, 2020, doi: 10.26418/jpasdev.v1i2.43439.
- [14] Muhammad Leo Adi Saputra, “Implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di kecamatan muara sugihan menggunakan metode Black Box Testing,” *Indones. J. Data Sci.*, vol. 2, no. 3, pp. 148–157, 2021, doi: 10.56705/ijodas.v2i3.57.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*